

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 20 / 2008 Pasal 6 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM sebanyak 62,92 juta, dan tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 116,43 juta orang. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,19 juta, dan tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 116,97 juta orang.

Besarnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia dapat mencerminkan besarnya potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih berkontribusi bagi Negara Indonesia. Pada krisis ekonomi 1997-1998 serta krisis ekonomi global 2008 UMKM mampu bertahan. Di saat perusahaan besar bangkrut lalu melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), di saat itulah UMKM dapat menyerap tenaga kerja.

UMKM di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan lapangan kerja. Menurut Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM juga mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor UMKM mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil, namun dapat menyumbang 57% PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan

menyerap 60% tenaga kerja. Namun, UMKM memerlukan bantuan lebih baik daripada akses untuk mendapatkan kredit, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan peluang investasi.

Potensi yang besar dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering terkendala karena masalah permodalan yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, memenangkan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mengelola peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk dan reformasi peraturan UMKM.

Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit untuk UMKM melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha, dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dari KUR adalah untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Penyebab dari penyaluran KUR yang rendah yaitu karena Bank yang ditugaskan untuk penyalur KUR sangat hati-hati dalam penyaluran kredit sebab mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak memberikan informasi akuntansi mengenai kondisi usahanya. Salah satu yang menjadi masalahnya adalah pengelolaan keuangan. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik dan transparan para pelaku bisnis UMKM sangat memerlukan pengetahuan dan keterampilan akuntansi. Yang menjadi dasar dari sistem akuntansi merupakan laporan keuangan atau pembukuan. Menurut UU No. 28 / 2007 Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, laporan keuangan juga harus disusun secara rapi, teratur, benar dan tertib.

Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAIA) menerbitkan SAK EMKM. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) merupakan yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. SAK EMKM merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Hal ini sangat dibutuhkan UMKM karena laporan keuangan adalah hal yang penting dalam sebuah usaha, setiap pengeluaran dan pemasukkan harus jelas dan seimbang agar usahanya maju.

Dewan Standar Akuntansi (DSAK) menyusun SAK yang lebih sederhana dari SAK-Entitas Private 2021 yaitu SAK EMKM pada HUT IAI ke-59 tahun 2016. Hal ini dikarenakan masih banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mampu untuk membuat serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku.

Laporan SAK EMKM dibuat berdasarkan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha seperti entitas bisnis umumnya. Syarat penyajian Laporan Keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, bisa dipahami, dan komparatif. Sesuai dengan peraturan SAK EMKM, minimal UMKM harus membuat tiga jenis laporan keuangan, yaitu : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Mulyani (2014), untuk meningkatkan kinerja UMKM diperlukan pula peningkatan kapasitas baik dari segi keuangan, manajemen dan profesionalitas. Hal yang dapat mempengaruhi informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang digambarkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yaitu latar belakang pendidikan, lamanya usaha dan ukuran usaha.

Peran Manager atau Pemilik Usaha sangatlah dominan dalam menjalankan suatu usaha. Pemilik usaha yang pernah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berbeda dalam mengelola usahanya jika dibandingkan dengan yang mengenyam pendidikan lebih rendah. Pemilik usaha yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mampu dalam menggunakan informasi akuntansi jika dibandingkan dengan

yang memiliki latar belakang selain akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Devi, Herawati dan Sulindawati (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan bagi kualitas laporan UMKM. Sedangkan Mulyani (2014) dan Fabillah (2019) menyatakan bahwa pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan bagi kualitas laporan keuangan.

Ukuran usaha merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya dengan mempertimbangkan total asset, jumlah karyawan dan pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. Penelitian yang telah dilakukan oleh Devi, Herawati dan Sulindawati (2017) dan Fabillah (2019) menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi laporan keuangan UMKM.

Lamanya usaha merupakan umur suatu perusahaan telah beroperasi. Perusahaan yang usianya kurang dari 10 tahun akan menyediakan sistem informasi akuntansi perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan karena menyediakan berbagai elemen yang penting dalam siklus akuntansi. Hasil dari sistem ini dapat digunakan untuk melaporkan informasi keuangan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Firmansyah (2014) dan Ida (2019) menyatakan bahwa lamanya usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Mulyani (2014) dan Fabillah (2019) menyatakan bahwa lamanya usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi laporan keuangan UMKM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan hasil penelitian. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas laporan keuangan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kualitas laporan keuangan UMKM yang ada di Jakarta Timur. Perkembangan UMKM di DKI Jakarta tepatnya di Jakarta Timur sangatlah signifikan, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM yang terdaftar adalah sebanyak 240.512.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten mengambil peran aktif mendorong dan menstimulus pengembangan UMKM dengan program Jakpreneur. Program ini diharapkan menjadi platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up,

lembaga pendidikan, dan juga pembiayaan. Mulai tanggal 1 Januari 2018 berlaku aktif SAK EMKM yang dirancang khusus untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi posisi dan kinerja keuangan. Informasi tersebut berguna bagi kreditor dan investor untuk pengambilan keputusan ekonomi sekaligus pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usaha. Ada 3 Laporan Keuangan menurut SAK EMKM, yaitu : Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan dalam bentuk dua periode atau 2 tahun (minimum) untuk dapat dibandingkan satu sama lain.

Tingginya pertumbuhan UMKM di Jakarta Timur tidak di imbangi dengan semakin sadarnya pelaku UMKM mengenai kualitas laporannya. Kebanyakan pelaku UMKM menganggap membuat laporan keuangan adalah hal yang merepotkan dan menambah pengeluaran, padahal era sekarang ini strategi dan perencanaan bisnis dapat dilihat dari laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai kualitas penerapan laporan keuangan pada UMKM di Jakarta Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Apakah latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Jakarta Timur tahun 2020 ?
- 2). Apakah ukuran usaha mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Jakarta Timur tahun 2020 ?
- 3). Apakah lama usaha mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Jakarta Timur tahun 2020 ?
- 4). Apakah pelatihan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Jakarta Timur tahun 2020 ?
- 5). Apakah latar belakang pendidikan, ukuran usaha, lamanya usaha berdiri dan pelatihan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Jakarta Timur tahun 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1). bukti empiris pengaruh positif latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
- 2). bukti empiris pengaruh positif ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
- 3). bukti empiris pengaruh positif lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
- 4). bukti empiris pengaruh positif pelatihan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
- 5). bukti empiris pengaruh positif latar belakang pendidikan, ukuran usaha, lamanya usaha berdiri dan pelatihan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Terungkapnya kualitas penerapan Laporan Keuangan EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- 1). Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh latar belakang pendidikan, lama usaha, dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
- 2). Regulator (Pembuat Kebijakan)
 - a. Kementerian UMKM, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan gambaran mengenai kualitas laporan UMKM di Jakarta Timur. Dari penelitian ini diharapkan pula agar dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan UMKM dapat berjalan lebih efisien.
 - b. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dalam memformulasikan pola dan kebijakan-kebijakan

pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM dapat menyajikan laporan keuangan UMKM yang akuntabel berdasarkan pada Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

3). Investor (Pemilik Modal)

Pemilik UMKM, penelitian ini memberikan kontribusi kepada UMKM sebagai bahan informasi bagi pengambilan keputusan pemilik UMKM tentang pentingnya pengetahuan mengenai system pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dengan menggunakan SAK EMKM.